

**TABEL VII.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1.		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.	01.	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan													
1.	01.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	14.146	100	14.146	100	14.146	100	14.146	100	14.146
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	258.000	100	258.000	100	258.000	100	258.000	100	258.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	33.475	100	33.475	100	33.475	100	33.475	100	33.475
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	259.623	100	259.623	100	259.623	100	259.623	100	259.623
1.	01.	02. Program Pengelolaan Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	99,62	99,7	88.163.241	99,75	88.393.334	99,8	97.393.334	99,85	89.393.334	99,9	89.393.334
			2 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	94,27	95,27	58.938.946	95,77	58.938.946	96,27	60.938.946	96,77	60.938.946	97,27	60.938.946
			3 APM PAUD	persen	67,62	73	23.772.925	76	23.772.925	80	23.772.925	82	23.772.925	84	23.772.925
			4 Presentase PKBM yang terakreditasi	persen	33,33	55,56	3.976.750	66,67	3.976.750	77,78	3.976.750	88,89	3.976.750	100,00	3.976.750
1.	01.	04. Program pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	persen	18,85	16,73	407.282	14,62	407.282	12,5	407.282	10,38	407.282	8,27	407.282
1.	02.	Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan													
1.	02.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	834.024	100	834.024	100	834.024	100	834.024	100	834.024
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	311.948	100	311.948	100	311.948	100	311.948	100	311.948
			7 Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021
1.	02.	02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	persen	49,12	50,88	61.235.479	51,72	65.235.479	52,54	64.235.479	54,24	66.235.479	55,93	66.235.479
			2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 100.000	2,18	2,20 s.d 2,25	-	2,20 s.d 2,25	-	2,25 s.d 2,30	-	2,30 s.d 2,35	30.000.000	2,30 s.d 2,35	5.000.000
			3 Prevalensi stunting (data EPPGM)	persen	16,93	15,6	3.874.246	15	3.874.246	14	3.874.246	14	3.874.246	13,6	3.874.246
			4 Angka morbiditas	persen	19,6	19,1	28.341.934	18,6	28.341.934	18,1	28.341.934	17,6	28.341.934	17,1	28.341.934

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1.	02.	03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	31,82	45,45	397.696	56,52	397.696	66,67	397.696	79,17	397.696	91,67	397.696	
1.	02.	04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1 Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	persen	39,76	44,19	20.449	49,43	20.449	54,55	20.449	59,55	20.449	64,44	20.449	
				2 Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persen	19,08	32,00	178.842	34,00	178.842	36,00	178.842	38,00	178.842	40,00	178.842	
1.	02.	05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	persen	23,43	25,10	713.607	27,20	713.607	28,03	713.607	28,87	713.607	30,13	713.607	
1.	03.	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1.	03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	14.802	100	14.802	100	14.802	100	14.802	100	14.802	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	686.628	100	686.628	100	686.628	100	686.628	100	686.628	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	62.200	100	62.200	100	62.200	100	62.200	100	62.200	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah				-		-		-		-		-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	506.474	100	506.474	100	506.474	100	506.474	100	506.474	
1.	03.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	45	46,5	9.560.689	47	9.560.689	48	9.560.689	49	9.560.689	50	19.560.689	
				2 Persentase bendung kondisi baik	persen	45	48	500.000	48,5	500.000	48,88	500.000	49	500.000	49,5	5.500.000	
1.	03.	03.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	persen	1,04	1,85	12.513.446	1,39	12.513.446	1,39	12.513.446	1,39	12.513.446	1,4	22.513.446	
1.	03.	04.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	persen	0,87	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	2.165.000	
1.	03.	05.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	persen	0,69	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,42	8.442.932	
1.	03.	08.	Program Penataan Bangunan Gedung	1 Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Angka	50	55	9.493.624	58	9.493.624	60	9.493.624	62	13.858.624	65	19.493.624	
1.	03.	09.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1 Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	persen	55	58	-	60	25.000	62	25.000	64	25.000	65	25.000	
1.	03.	10.	Program Penyelenggaraan Jalan	1 Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen	1,5	2,6	48.444.450	1,4	58.444.450	1,3	61.146.950	1,5	88.122.110	1,4	97.542.110	
1.	03.	11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Persentase jasa konstruksi yang terbina	persen	67	68	148.957	69	148.957	70	148.957	71	148.957	72	148.957	
1.	03.	12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan	2	3	124.000	4	124.000	5	124.000	6	124.000	7	124.000	
1.	04.	Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1.	04.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.825	100	11.825	100	11.825	100	11.825	100	11.825	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	719.685	100	719.685	100	719.685	100	719.685	100	719.685	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	62.000	100	62.000	100	62.000	100	62.000	100	62.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	6.525	100	6.525	100	6.525	100	6.525	100	6.525	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	126.433	100	126.433	100	126.433	100	126.433	100	126.433	
1.	04.	02. Program Pengembangan Perumahan	1 Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	persen	100	100	366.250	100	366.250	100	366.250	100	366.250	100	366.250
1.	04.	03. Program Kawasan Permukiman	1 Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	persen	NA	12,44	921.250	24,88	921.250	37,31	921.250	49,75	921.250	62,19	921.250
1.	04.	04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	96,09	96,90	25.000	97,71	1.525.000	98,52	1.525.000	99,32	1.525.000	100,00	1.525.000
1.	04.	05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1 Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	persen	75,47	77,36	1.633.600	79,25	1.633.600	81,13	1.633.600	83,02	1.633.600	84,91	1.633.600
1.	04.	06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	persen	100	100	-	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000
1.	05.	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	05.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	20.620	100	20.620	100	20.620	100	20.620	100	20.620
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	2.263	100	2.263	100	2.263	100	2.263	100	2.263
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	436.059	100	436.059	100	436.059	100	436.059	100	436.059
1.	05.	02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	persen	99,65	99,66	498.043	99,65	498.043	99,66	498.043	99,65	498.043	99,64	498.043
			2 Persentase penegakkan perda	persen	11,32	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895
1.	05.	03. Program Penanggulangan Bencana	1 Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	persen	51	52	977.837	53	977.837	54	1.009.005	55	1.155.288	56	2.477.837
1.	05.	04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Persentase penanganan kejadian kebakaran	persen	100	100	762.377	100	762.377	100	762.377	100	762.377	100	3.762.377
1.	06.	Usuran Pemerintahan Bidang Sosial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	06.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	13.375	100	13.375	100	13.375	100	13.375	100	13.375
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	986.696	100	986.696	100	986.696	100	986.696	100	986.696	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	10.500	100	10.500	100	10.500	100	10.500	100	10.500	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	3.010	100	3.010	100	3.010	100	3.010	100	3.010	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	279.406	100	279.406	100	279.406	100	279.406	100	279.406	
1.	06.	02. Program Pemberdayaan Sosial	1 Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	55,91	57,12	1.805.400	58,34	1.805.400	59,55	1.805.400	60,77	1.805.400	61,98	1.805.400
1.	06.	04. Program Rehabilitasi Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	persen	39,13	42,25	5.352.610	45,36	5.352.610	45,36	5.352.610	46,92	5.352.610	48,47	5.352.610
1.	06.	05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	persen	84,87	85,87	708.000	86,87	708.000	87,69	708.000	88,87	708.000	89,87	708.000
1.	06.	06. Program penanganan bencana	1 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	92,85	93,90	386.585	94,94	386.585	95,99	386.585	97,04	386.585	100,00	386.585
1.	06.	07. Program pengelolaan taman makam pahlawan	1 Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitas pengeloannya	persen	100	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000
2.			Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				-		-		-		-		-
2.	07.		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				-		-		-		-		-
2.	07.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	8.415	100	8.415	100	8.415	100	8.415	100	8.415
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	961.685	100	961.685	100	961.685	100	961.685	100	961.685
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	184.291	100	184.291	100	184.291	100	184.291	100	184.291
2.	07.	02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	NA	50	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000
2.	07.	03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	1,5	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600
2.	07.	04. Program Penempatan Tenaga Kerja	1 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah	persen	31,51	43,38	525.000	50,23	525.000	54,79	525.000	59,36	525.000	63,93	525.000
2.	07.	05. Program Hubungan Industrial	1 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	91,84	92,54	57.250	93,01	57.250	93,24	57.250	93,71	57.250	94,17	57.250
2.	08.		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-		-		-		-		-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.	08.	02.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	persen	13,82	13,95	376.000	14,02	376.000	14,08	376.000	14,15	376.000	14,15	376.000	
				2 Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	persen	30,19	30,35	30.735	30,43	30.735	30,51	30.735	30,59	30.735	30,59	30.735	
2.	08.	03.	Program Perlindungan Perempuan	1 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	2,84	2,64	171.384	2,43	171.384	2,23	171.384	2,03	171.384	1,83	171.384	
2.	08.	05.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1 Persentase data gender dan anak yang disediakan	persen	100	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	
2.	08.	06.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1 Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen	28,87	30,13	87.607	31,38	87.607	32,64	87.607	33,89	87.607	35,15	87.607	
2.	08.	07.	Program Perlindungan Khusus Anak	1 Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	persen	18,42	22,46	254.290	26,49	254.290	30,53	254.290	34,57	254.290	38,61	254.290	
				2 Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	persen	97,73	100	46.100	100	46.100	100	46.100	100	46.100	100	46.100	
2.	09.		Usuran Pemerintahan Bidang Pangan				-		-		-		-		-		
2.	09.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	619.965	100	619.965	100	619.965	100	619.965	100	619.965	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah			4.994		4.994		4.994		4.994		4.994		
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	144.081	100	144.081	100	144.081	100	144.081	100	144.081	
2.	09.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	persen	52,21	53,98	1.090.000	54,87	1.090.000	55,75	1.090.000	56,64	1.090.000	57,52	1.090.000	
2.	09.	03.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	persen	90	93,6	189.402	94,5	189.402	95,8	189.402	96,3	189.402	97,8	189.402	
2.	09.	04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1 Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III)	persen	26,78	25,10	743.525	24,27	743.525	23,43	743.525	22,59	743.525	21,76	743.525	
2.	09.	05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1 Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	persen	89,7	90	80.000	90	80.000	90	80.000	90	80.000	90	80.000	
2.	10.		Usuran Pemerintahan Bidang Pertanahan				-		-		-		-		-		
2.	10.	04.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	5.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	
2.	10.	05.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1 Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	persen	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
2.	10.	10.	Program Penatagunaan Tanah	1 Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	persen	0,1	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	
2.	11.		Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				-		-		-		-		-		
2.	11.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	5.925	100	5.925	100	5.925	100	5.925	100	5.925	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507		
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	339.639	100	339.639	100	339.639	100	339.639	100	339.639		
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000		
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	352.892	100	352.892	100	352.892	100	352.892	100	352.892		
2.	11.	02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	persen	NA	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	
2.	11.	03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	persen	NA	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	
2.	11.	04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1 Persentase peningkatan luas RTH	persen	NA	0,7	986.384	1,05	3.956.881	1,4	3.956.881	1,75	986.384	2	5.961.384	
2.	11.	05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1 Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	persen	37,32	58,45	14.129	69,01	14.129	79,58	14.129	90,14	14.129	100	14.129	
2.	11.	06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	persen	100	100	56.979	100	56.979	100	56.979	100	56.979	100	56.979	
2.	11.	08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Persentase bank sampah yang beroperasi	persen	60,00	62,86	15.699	64,29	15.699	65,71	15.699	67,14	15.699	68,57	15.699	
2.	11.	09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Persentase sekolah adiwiyata	persen	4,20	5,73	27.812	6,50	27.812	7,26	27.812	7,77	27.812	8,54	27.812	
2.	11.	10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1 Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	25.105	100	25.105	100	25.105	100	25.105	100	25.105	
2.	11.	11. Program Pengelolaan Persampahan	1 Cakupan area pelayanan sampah	persen	55,56	61,11	5.374.830	61,11	12.374.830	66,67	7.374.830	66,67	7.374.830	66,67	7.374.830	
2.	12.	Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					-			-			-		-	
2.	12.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.	12.	02.	Program Pendaftaran Penduduk	1 Cakupan kepemilikan KTP elektronik	persen	98,98	99	1.256.700	99,02	1.256.700	99,04	1.256.700	99,06	1.256.700	99,08	1.256.700	
				2 Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	persen	99,12	99,17	89.270	99,22	89.270	99,27	89.270	99,32	89.270	99,37	89.270	
				3 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	33,43	40	50.000	50	50.000	60	50.000	70	50.000	80	50.000	
2.	12.	03.	Program Pencatatan Sipil	1 Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	persen	72,48	72,58	145.000	72,68	145.000	72,78	145.000	72,88	145.000	72,98	145.000	
				2 Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak	persen	100	100	112.500	100	112.500	100	112.500	100	112.500	100	112.500	
2.	12.	04.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	5,00	33,33	517.500	38,46	517.500	42,86	517.500	46,67	517.500	50,00	517.500	
2.	12.	05.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	persen	95,71	96,04	77.000	96,37	77.000	96,70	77.000	97,03	77.000	97,36	77.000	
2.	13.		Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2.	13.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	267.676	100	267.676	100	267.676	100	267.676	100	267.676	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	5.550	100	5.550	100	5.550	100	5.550	100	5.550	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	101.202	100	101.202	100	101.202	100	101.202	100	101.202	
2.	13.	02.	Program Penataan Desa	1 Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	83,04	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
2.	13.	03.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1 Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	persen	55,36	70,98	42.500	74,55	42.500	77,68	42.500	80,36	42.500	83,04	42.500	
2.	13.	04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan desa	persen	NA	44,85	681.766	48,15	681.766	51,5	681.766	54,9	681.766	58,2	681.766	
2.	13.	05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen	62,61	63,02	4.198.077	63,14	4.198.077	63,25	4.198.077	63,37	4.198.077	63,44	4.198.077	
2.	14.		Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2.	14.	02.	Program Pengendalian Penduduk	1 Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	persen	100	100	161.900	100	161.900	100	161.900	100	161.900	100	161.900	
2.	14.	03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen	9,93	9,75	4.169.508	9,57	4.169.508	9,39	4.169.508	9,20	4.169.508	9,02	4.169.508	
				2 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	32,29	33,00	3.307.861	33,70	3.307.861	34,38	3.307.861	35,04	3.307.861	35,68	3.307.861	
2.	14.	04.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1 Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	persen	10,29	10,32	15.000	10,34	15.000	10,37	15.000	10,39	15.000	10,41	15.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		2 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	persen	80,55	82,15	404.917	83,77	404.917	85,41	404.917	86,51	404.917	88,00	404.917	
2.	15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			-		-		-		-		-		
2.	15.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.516.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083	
2.	15.	02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persen	71,02	71,02	902.020	71,12	2.602.020	71,22	902.020	71,32	902.020	71,42	902.020	
		2 Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	persen	57,8	70	4.358.870	75	4.358.870	78	4.358.870	80	4.358.870	83	4.358.870	
2.	16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			-		-		-		-		-		
2.	16.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	771.888	100	771.888	100	771.888	100	771.888	100	771.888	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	34.847	100	34.847	100	34.847	100	34.847	100	34.847	
2.	16.	02. Program Informasi dan Komunikasi Publik	persen	50	60	606.206	70	606.206	80	606.206	90	606.206	100	606.206	
2.	16.	03. Program Aplikasi Informatika	persen	67,44	75	927.620	80	927.620	85	927.620	95	927.620	100	927.620	
2.	17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			-		-		-		-		-		
2.	17.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	457.600	100	457.600	100	457.600	100	457.600	100	457.600	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	192.655	100	192.655	100	192.655	100	192.655	100	192.655	
2.	17.	03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	72,6	74,3	38.500	75,1	38.500	75,9	38.500	76,7	38.500	77,6	38.500	
2.	17.	04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	persen	51	56	63.750	58	63.750	60	63.750	65	63.750	68	63.750	
2.	17.	05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persen	45	50	470.554	55	470.554	60	470.554	62	470.554	65	470.554	
2.	17.	06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persen	7	8	316.017	10	316.017	12	316.017	14	316.017	14	316.017	
2.	17.	07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	persen	2,5	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	
2.	17.	08. Program Pengembangan UMKM	persen	4,00	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	
2.	18.	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				-		-		-		-		-	
2.	18.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	9.550	100	9.550	100	9.550	100	9.550	100	9.550	
		2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	
		3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	335.687	100	335.687	100	335.687	100	335.687	100	335.687	
		4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5. Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	
		6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	87.938	100	87.938	100	87.938	100	87.938	100	87.938	
2.	18.	02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	point	78,3*	78,3	38.100	80	38.100	80	38.100	82	38.100	82	38.100	
2.	18.	03. Program Promosi Penanaman Modal	investor	2	2	54.021	3	54.021	3	54.021	3	54.021	3	54.021	
2.	18.	04. Program Pelayanan Penanaman Modal	point	3,9	3,95	50.790	4	50.790	4,1	50.790	4,2	50.790	4,5	50.790	
2.	18.	05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persen	85	95	432.452	105	432.452	115	432.452	125	432.452	135	432.452	
2.	18.	06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persen	9,68	23,39	17.850	34,68	17.850	64,52	17.850	75,00	17.850	84,68	17.850	
2.	19.	Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				-		-		-		-		-	
2.	19.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.547	100	11.547	100	11.547	100	11.547	100	11.547	
		2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	
		3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	825.639	100	825.639	100	825.639	100	825.639	100	825.639	
		4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	
		5. Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	6.100	100	6.100	100	6.100	100	6.100	100	6.100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	100.506	100	100.506	100	100.506	100	100.506	100	100.506		
2.	19.	02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	persen	20,8	25	1.013.404	29,2	1.013.404	33,3	1.013.404	37,5	1.013.404	41,7	1.013.404
2.	19.	03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan	1 Persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	persen	42,42	45,45	9.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960
2.	19.	04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 Persentase kelompok pramuka aktif	persen	100	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000
2.	20.		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					-		-		-		-		
2.	20.	02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	persen	50	70	26.391	80	26.391	90	26.391	100	26.391	100	26.391
2.	21.		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					-		-		-		-		
2.	21.	02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait	persen	100	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	48.000
2.	22.		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					-		-		-		-		
2.	22.	02.	Program Pengembangan Kebudayaan	1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek	6	6	328.525	7	328.525	7	5.328.525	7	328.525	8	328.525
2.	22.	04.	Program Pembinaan Sejarah	1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	persen	70	70	45.972	70	45.972	80	45.972	80	45.972	80	45.972
2.	22.	05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarkan	persen	15	15	282.771	15	282.771	15	282.771	15	282.771	15	282.771
2.	22.	06.	Program Pengelolaan Permuseuman	1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola	persen	100	100	697.676	100	697.676	100	697.676	100	697.676	100	697.676
2.	23.		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					-		-		-		-		
2.	23.	02.	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Persentase perpustakaan aktif	persen	2,25	2,75	10.912.161	3,24	912.161	3,73	912.161	4,22	912.161	4,71	912.161
2.	23.	03.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1 Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmedialkan)	persen	20	40	25.000	60	25.000	80	25.000	90	25.000	100	25.000
2.	24.		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					-		-		-		-		
2.	24.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	8.025	100	8.025	100	8.025	100	8.025	100	8.025
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	683.377	100	683.377	100	683.377	100	683.377	100	683.377
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	3.600	100	3.600	100	3.600	100	3.600	100	3.600
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	106.960	100	106.960	100	106.960	100	106.960	100	106.960
2.	24.	02.	Program Pengelolaan Arsip	1 Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	persen	6,47	19,42	81.142	25,89	81.142	32,36	81.142	38,83	81.142	47,89	81.142
2.	24.	03.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	persen	NA	100	42.500	100	42.500	100	42.500	100	42.500	100	42.500
3.			Urusan Pilihan					-		-		-		-		
3.	25.		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					-		-		-		-		
3.	25.	03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 Produksi perikanan tangkap	ton	282	270	55.000	272	55.000	275	55.000	278	55.000	281	55.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
3.	25.	04.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Produksi perikanan budidaya	ton	6.376	6.504	117.000	6.634	117.000	6.766	117.000	6.902	117.000	7.040	117.000	
3.	25.	06.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Produksi olahan ikan	ton	2.112	2.154	57.000	2.197	57.000	2.241	57.000	2.286	57.000	2.232	57.000	
3.	26.		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
3.	26.	02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1 Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	persen	20,59	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	3.442.000	
3.	26.	03.	Program Pemasaran Pariwisata	1 Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	persen	9,52	50	286.476	55,88	286.476	66,18	286.476	73,53	286.476	80,88	286.476	
3.	26.	05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	orang	118	124	72.950	128	72.950	131	72.950	135	72.950	138	72.950	
3.	27.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
3.	27.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	590.750	100	590.750	100	590.750	100	590.750	100	590.750	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	7.450	100	7.450	100	7.450	100	7.450	100	7.450	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	188.860	100	188.860	100	188.860	100	188.860	100	188.860	
3.	27.	02.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	persen	38,03	39	1.071.550	40	1.071.550	41	1.071.550	42	1.071.550	43	1.071.550	
3.	27.	03.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan	persen	99,99	100	13.206.550	100	7.601.100	100	5.643.900	100	3.905.100	100	3.905.100	
3.	27.	04.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1 Prevalensi penyakit hewan	persen	22,80	20,30	220.054	19,80	220.054	19,30	220.054	18,80	220.054	18,30	220.054	
				2 Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	persen	77	80	23.280	82	23.280	84	23.280	86	23.280	87	23.280	
3.	27.	05.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1 Persentase penanggulangan bencana pertanian	persen	56	60	409.525	62	409.525	64	409.525	66	409.525	68	409.525	
3.	27.	07.	Program Penyuluhan Pertanian	1 Persentase kelompok tani (kategori madya dan utama)	persen	9,69	10,98	1.754.351	11,83	1.754.351	12,69	1.754.351	14,04	1.754.351	15,61	1.754.351	
3.	30.		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
3.	30.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	431.359	100	431.359	100	431.359	100	431.359	100	431.359	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	135.114	100	135.114	100	135.114	100	135.114	100	135.114		
3.	30.	02.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1 Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	persen	77,50	85,00	40.000	90,00	40.000	90,00	40.000	90,00	40.000	95,00	40.000
3.	30.	03.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Persentase Pasar Rakyat layak usaha	persen	28,57	33,33	3.864.940	38,10	9.864.940	42,86	5.864.940	47,62	5.864.940	52,38	5.864.940
3.	30.	04.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	persen	83,33	88,89	99.875	88,89	399.875	94,44	399.875	94,44	399.875	94,44	399.875
3.	30.	05.	Program Pengembangan Ekspor	1 Nilai Ekspor	miliar rupiah	1804	2027	124.100	2149	324.100	2278	324.100	2414	324.100	2559	324.100
3.	30.	06.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	14,84	39,84	217.875	52,34	217.875	64,84	217.875	77,34	217.875	89,84	217.875
3.	31.		Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian					-		-			-		-	
3.	31.	02.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1 Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	190	225	819.000	250	819.000	275	819.000	300	819.000	325	819.000
3.	31.	03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1 Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	persen	NA	80,00	15.020	85,00	15.020	87,50	15.020	90,00	15.020	90,00	15.020
3.	31.	04.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	20	40	9.440	100	9.440	200	9.440	300	9.440	400	9.440
3.	32.		Usuran Pemerintahan Bidang Transmigrasi					-		-			-		-	
3.	32.	03.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	NA	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000
4.			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					-		-			-		-	
4.	01.		Unsur Sekretariat Daerah					-		-			-		-	
4.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	3.100.000
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800
				7 Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	NA	100	776.000	100	776.000	100	776.000	100	776.000	100	776.000
				8 Persentase Ketercapaian rasmitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	NA	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079
				9 berita yang mendapat respon publik	persen	100	100	217.709	100	217.709	100	217.709	100	217.709	100	217.709
				10 Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	angka	66	66	184.761	67	184.761	68	184.761	69	184.761	70	184.761
4.	01.	02.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan	persen	100	100	485.983	100	485.983	100	485.983	100	485.983	100	485.983
				2 Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra	persen	100	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673
				3 Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	persen	100	100	508.480	100	508.480	100	508.480	100	508.480	100	508.480

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
4.	01.	03.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	persen	5	6,44	105.853	6,56	105.853	13,91	105.853	7,09	105.853	7,16	105.853	
				2 capaian realisasi program rumpun ekonomi dan pembangunan	persen	100	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	
				3 Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	kriteria	1	5	374.839	7	374.839	9	374.839	9	374.839	9	374.839	
4.	02.		Unsur Sekretariat DPRD				-		-		-		-		-		
4.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	5.791	100	5.791	100	5.791	100	5.791	100	5.791	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.772	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	906.079	100	906.079	100	906.079	100	906.079	100	906.079	
				7 Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	persen	NA	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	
4.	02.	02.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	persen	NA	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	
				2 Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	persen	NA	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	
5.			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 unsur)				-		-		-		-		-		
5.	01.		Unsur Perencanaan				-		-		-		-		-		
5.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	20.900	100	20.900	100	20.900	100	20.900	100	20.900	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	484.793	100	484.793	100	484.793	100	484.793	100	484.793	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	16.280	100	16.280	100	16.280	100	16.280	100	16.280	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100.300	100	100.300	100	100.300	100	100.300	100	100.300	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	304.270	100	304.270	100	304.270	100	304.270	100	304.270	
5.	01.	02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	persen	80,7	81,7	85.000	82,3	85.000	83,0	85.000	83,6	85.000	84,2	85.000	
				2 Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100	100	116.049	100	116.049	100	116.049	100	116.049	100	116.049	
				3 Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	persen	100	100	550.282	100	850.282	100	1.050.282	100	1.050.282	100	550.282	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
5.	01.	03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	96,08	96,46	228.396	97,05	228.396	97,64	228.396	98,23	228.396	98,82	228.396	
				2 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang Ekonomi	persen	100,00	95,12	173.935	95,12	173.935	95,12	173.935	96,75	173.935	98,37	173.935	
				3 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	persen	94,74	94,74	155.749	94,74	155.749	94,74	155.749	96,49	155.749	98,25	155.749	
5.	02.		Unsur Keuangan				-		-		-		-		-		
5.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	
				3 Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	973.011	100	973.011	100	973.011	100	973.011	100	973.011	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	5.050	100	5.050	100	5.050	100	5.050	100	5.050	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	251.820	100	251.820	100	251.820	100	251.820	100	251.820	
5.	02.	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPd	persen	100	100	540.233	100	540.233	100	540.233	100	540.233	100	540.233	
				2 Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	angka	NA	87	178.425	88	178.425	89	178.425	90	178.425	91	178.425	
				3 Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	angka	100	100	79.498	100	79.498	100	79.498	100	79.498	100	79.498	
				4 Tingkat ketepatan waktu penyaluran dana transfer dan BT	persen	100	100	400.690.324	100	389.635.567	100	389.867.352	100	396.926.084	100	390.629.529	
5.	02.	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	dokumen	NA	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	
5.	02.	04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Persentase pertumbuhan pajak daerah	persen	4	4,25	20.523	4,5	20.523	4,75	20.523	5	20.523	5	20.523	
				2 Cakupan database wajib pajak yang valid	persen	100	100	186.134	100	186.134	100	186.134	100	186.134	100	186.134	
5.	03.		Unsur Kepegawaian				-		-		-		-		-		
5.	03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	276.613	100	276.613	100	276.613	100	276.613	100	276.613	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	40.175	100	40.175	100	40.175	100	40.175	100	40.175	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	104.149	100	104.149	100	104.149	100	104.149	100	104.149	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
5.	03.	02.	Program Kepegawaian Daerah	1 Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi	angka	NA	0,06	801.083	0,1	801.083	0,11	801.083	0,14	801.083	0,16	801.083	
				2 Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi	angka	NA	0,02	226.904	0,04	226.904	0,04	226.904	0,05	226.904	0,06	226.904	
				3 Indeks Kinerja dan disiplin	angka	NA	0,07	50.150	0,12	50.150	0,13	50.150	0,16	50.150	0,18	50.150	
				4 Indeks kompetensi	angka	NA	0,07	1.540.883	0,13	1.540.883	0,14	1.540.883	0,18	2.736.518	0,21	2.736.518	
5.	04.		Unsur Pendidikan dan Pelatihan				-		-		-		-		-		
5.	04.	02.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	persen	NA	80	825.000	80	825.000	80	825.000	90	825.000	90	825.000	
5.	05.		Unsur Penelitian dan Pengembangan				-		-		-		-		-		
5.	05.	02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	persen	NA	34,29	169.575	35,71	169.575	37,14	169.575	38,57	169.575	40,00	169.575	
6.			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 unsur)				-		-		-		-		-		
6.	01.		Inspektorat Daerah				-		-		-		-		-		
6.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	211.982	100	211.982	100	211.982	100	211.982	100	211.982	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	142.928	100	142.928	100	142.928	100	142.928	100	142.928	
6.	01.	02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	persen	60	65	673.632	70	673.632	75	673.632	80	673.632	85	673.632	
6.	01.	03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Angka	1,50	1,75	154.204	2	154.204	2,25	154.204	2,5	154.204	3	154.204	
				2 Nilai MCP Korsubgah	Angka	73,35	72	85.730	75	85.730	78	85.730	82	85.730	87	85.730	
7.			Unsur Kewilayahan (1 unsur)				-		-		-		-		-		
7.	01.		Kecamatan				-		-		-		-		-		
7.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	201.112	100	201.112	100	201.112	100	201.112	100	201.112	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	48.940	100	48.940	100	48.940	100	48.940	100	48.940	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	369.974	100	369.974	100	369.974	100	369.974	100	369.974	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	
7.	01.	02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	NA	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	
7.	01.	03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	NA	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
7.	01.	04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbacaan Umum	1 Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	NA	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855
7.	01.	05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	NA	100	726.463	100	726.463	100	726.463	100	726.463	100	726.463
7.	01.	06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	NA	30 - 44	10.000	45 - 48	180.000	49 - 51	180.000	52 - 54	180.000	55 - 58	180.000
8.			Unsur Pemerintahan Umum (1 unsur)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	01.		Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	324.674	100	324.674	100	324.674	100	324.674	100	324.674
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	17.500	100	17.500	100	17.500	100	17.500	100	17.500
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	114.250	100	114.250	100	114.250	100	114.250	100	114.250
8.	01.	02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534
8.	01.	03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	1.962.109	31,90	1.962.109	31,90	39.962.109	31,90	1.962.109	31,90	1.962.109
8.	01.	04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Persentase ormas yang terbina	persen	8,38	17,96	602.000	20,96	602.000	23,95	602.000	26,95	602.000	28,00	602.000
8.	01.	05.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000
8.	01.	06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	30	50	1.186.820	45	1.186.820	60	1.186.820	35	1.186.820	30	1.186.820